

## **Pendapatan Asli Daerah - Menuju PAD Rp2 Triliun, Bapenda Makassar Genjot Pendapatan Sektor Pajak pada 2024**



Sumber Gambar:

<https://gosulsel.com/2024/03/01/menuju-pad-rp2-triliun-bapenda-makassar-genjot-pendapatan-sektor-pajak-pada-2024/>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar optimis bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2 Triliun pada tahun 2024.

Tren peningkatan PAD pun terus terlihat. Di tahun 2023, Bapenda Makassar telah mengantongi pendapatan Rp1,5 Triliun.

Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra menyampaikan potensi pendapatan bisa lebih besar. Apalagi sudah ada pemberlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana Pemkot Makassar telah mengundangkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kata Firman, perubahan regulasi ini ditekankan kepada OPD Pengelola PAD dapat melakukan perubahan regulasi yang bersifat regeling dan beschikking agar segera disesuaikan dengan dinamika perkembangan Hukum.

PAD menjadi satu kesatuan dalam pembiayaan belanja daerah yang telah masuk dalam Program pada APBD Makassar, seluruh OPD, BUMD diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PAD.

Dengan melakukan intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber PAD sehingga target Penerimaan PAD dapat tercapai.

“Kita semua patut bersyukur PAD Tahun 2023 kemarin telah mencapai Rp1,5 Triliun dan capaian ini memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah Pemkot Makassar. Keberhasilan didorong oleh inovasi OPD termasuk Bapenda sebagai pengelola Pajak Daerah melalui Aplikasi PAKINTA,” ucap Firman saat rakorsus pendapatan daerah di Bali beberapa waktu yang lalu.

Firman menekankan untuk terus membangun sinergitas dan kolaborasi OPD dan BUMD agar dapat menggali potensi untuk optimalisasi menuju PAD Rp2 triliun tahun 2024.

Ia pun menilai PAD sama pentingnya dengan belanja anggaran yang perlu perencanaan serta dievaluasi progresnya setiap saat.

“Semoga dengan menghadirkan beberapa pemateri dari berbagai sektor terkait pengelolaan PAD dapat memicu dan memacu para OPD dan BUMD untuk saling bahu membahu menuju PAD Rp2 triliun,” harap Firman.

Sementara, Sekretaris Bapenda Makassar, Fuad Arfandi menambahkan OPD pengelola Pendapatan Daerah lingkup Pemkot Makassar diharapkan melakukan percepatan dan push dalam peningkatan PAD sehingga target atau realisasi penerimaan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

“Pengelolaan kita berbentuk digitalisasi dalam pelayanan kepada masyarakat serta pelaku usaha dapat terus dilakukan sehingga mempercepat proses pelayanan dan penerimaan PAD,” ujarnya.

Fuad juga berharap BUMD Kota Makassar diharapkan dapat berkolaborasi dengan OPD pengelola Pendapatan Daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar agar sinergitas dan optimalisasi pendapatan daerah dapat berkesinambungan.

Tak hanya itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar 2024, yang digelar oleh Bappeda Kota Makassar, di Hotel Claro pada Selasa pagi (6/3).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menekankan tiga poin utama yang harus diperhatikan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pertama, pentingnya musrenbang dalam menentukan arah pembangunan suatu kota. Di mana,

seluruh usulan-usulan dari masyarakat hingga usulan terkecil sekali pun memberikan dampak yang signifikan terhadap performa kota Makassar.

Poin kedua, Danny melanjutkan adanya respon positif dari pemerintah pusat terkait usulan-usulan dari masyarakat kota Makassar untuk segera dilakukan untuk pembenahan.

Poin terakhir yakni pemberian apresiasi dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan usulan untuk dicatat dengan baik dalam sejarah.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Fuad Arfandi memaparkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 sebanyak Rp2,6 triliun.

PAD Rp2,6 triliun tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar Rp2.1 triliun lebih, retribusi Rp230 miliar lebih.

Realisasi pajak daerah Rp.1,3 triliun, pembayaran melalui kanal digital sebesar Rp. 993 miliar lebih.

Target tersebut dipatok sesuai dengan tren PAD didapatkan tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan tetap adanya konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun.

Sumber Berita:

1. <https://gosulsel.com/2024/03/01/menuju-pad-rp2-triliun-bapenda-makassar-genjot-pendapatan-sektor-pajak-pada-2024/> 1 Maret 2024;
2. <https://bapenda.makassarkota.go.id/2024/03/14/bapenda-hadiri-pertemuan-persiapan-musrenbang/> 13 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan

Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.